



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI**

**(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	V
Rapat	:	Ke – 25
Jenis Rapat Dengan	:	Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komnas HAM Pergerakan Dokter Muda Indonesia
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 18 Juni 2026
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	:	Audiensi terkait Ditahannya Hak Asasi Dokter Muda Setelah Menyelesaikan Studi Pendidikan Kedokteran dan Penahanan Sertifikat Profesi serta Dampaknya
Ketua Rapat	:	Dr. Andreas Hugo Pariera/ Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/ F. PDI P
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	:	orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII DPR RI

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XIII DPR RI dengan Komnas HAM dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia, dipimpin Dr. Andreas Hugo Pariera/ Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/ F. PDI P dimulai pukul 13.30 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

Agenda Rapat adalah : Audiensi terkait Ditahannya Hak Asasi Dokter Muda Setelah Menyelesaikan Studi Pendidikan Kedokteran dan Penahanan Sertifikat Profesi serta Dampaknya

## II. KESIMPULAN RAPAT :

Komisi XIII DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Komnas HAM dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI). Berdasarkan hasil rapat tersebut, disimpulkan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Merekomendasikan Komnas HAM untuk melakukan pemantauan terkait aspek Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan dan profesi kedokteran, khususnya dalam pemenuhan hak untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Kementerian / Lembaga terkait dan Komisi XIII DPR RI.
2. Komnas HAM berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kolegium Dokter, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) guna memperoleh penyelesaian tuntas terhadap permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh PDMI.
3. Komisi XIII DPR RI merekomendasikan:
  1. Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan Pendidikan dan Profesi Dokter.

2. Kementerian Sekretariat Negara mengoordinasikan lintas Kementerian / Lembaga yang berkaitan dengan Pendidikan dan Profesi Dokter.
3. BPIP menyusun kajian kebijakan berdasarkan nilai - nilai pancasila yang berkaitan dengan Pendidikan dan Profesi Dokter.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB.

**Jakarta, 18 Juni 2026**

**KETUA KOMNAS HAM**

**PIMPINAN KOMISI XIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**ANIS HIDAYAH**

**DR. ANDREAS HUGO PARIERA  
A-242**